

ABSTRAK

Pariwisata menjadi suatu sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Hal tersebut menginspirasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Salah satunya adalah obyek wisata pantai Wonokerto. Dalam perkembangannya, pantai Wonokerto sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan terutama pada hari jum'at dan minggu. Ditambah dengan adanya upacara *Nyadran* dan *Syawalan* yang diadakan setiap tahun semakin menambah daya tarik obyek wisata pantai Wonokerto. Namun pengelolaan yang dilakukan terkesan masih belum maksimal. Ditambah dengan dampak negatif pariwisata dan faktor alam yang mengancam keberlanjutan pariwisata yang ada. Sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana mengembangkan kelembagaan eksisting pengelola komponen pariwisata dengan prinsip kelembagaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk melihat kondisi komponen pariwisata, mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat, mengetahui tingkat kepentingan dan wewenang setiap *stakeholders* sehingga dapat dipetakan peran masing-masing *stakeholders*, aturan dan kebijakan yang mengatur kawasan pesisir pantai Wonokerto dan kelembagaan eksisting.

Hasil penelitian menunjukkan kawasan pesisir pantai Wonokerto mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Beberapa atraksinya seperti pantai yang luas dan landai, keberadaan Tempat Pelelangan Ikan, tambak, mangrove dan kebun melati serta adanya atraksi budaya yaitu *Nyadran* dan *Syawalan* yang rutin diadakan setiap tahun oleh swadaya masyarakat dan selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun pelayanan wisata (*amenity*) dan aksesibilitas masih dirasakan sangat kurang oleh wisatawan. Promosi pariwisata juga hanya dilakukan secara manual dengan komunikasi verbal mengenai pengalaman kunjungan.

Kebijakan pengembangan pariwisata pesisir pantai wonokerto secara regulasi sudah dilakukan, namun dalam tahap implementasinya masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Pekalongan dewasa ini selalu diarahkan ke wilayah daratan. Secara umum, dari 15 *stakeholders* yang ada sudah melakukan upaya pengelolaan untuk pengembangan pariwisata pesisir pantai Wonokerto. Namun masih dilakukan sendiri-sendiri sesuai kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders*. Tidak adanya koordinasi antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama. Dan tidak ada pengelola formal terhadap kawasan pariwisata pantai Wonokerto. Sehingga diperlukan satu bentuk kelembagaan dalam bentuk Kemitraan Unit Pelaksana Teknis yang dibawah oleh Dinas Pariwisata yang dikolaborasikan dengan *stakeholders* yang mempunyai kepentingan dan pengaruh di kawasan tersebut, sehingga pariwisata pesisir pantai Wonokerto dapat berkelanjutan.

Kata Kunci : *Kelembagaan, Pariwisata, Stakeholders, Berkelanjutan*